

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH**

**Inggit Damayanti**  
**Andries Lionardo**  
**Muhammad Ervan Marzuki**  
**Email: inggitdamayanti78@gmail.com**

## **ABSTRAK**

**Inggit Damayanti.** Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpukan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih di dasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari instansi Dinas Lingkungan Hidup, kemudian budaya masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan serta minimnya sanksi bagi masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sampah Plastik**

## **ABSTRACT**

**Inggit Damayanti.** *Implementation of local government policies in handling plastic bag waste in South Prabumulih District, Prabumulih City. This study aims to describe and analyze the implementation of local government policies in handling plastic bag waste in South Prabumulih District, Prabumulih City. The method used uses qualitative methods with techniques of collecting observational data, interviews and documentation. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of local government policies in handling plastic bag waste in South Prabumulih District, Prabumulih City, based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally, this is due to several factors, namely the lack of facilities and infrastructure as well as human resources from Environmental Agency agencies, Then the culture of people who still like to litter and the lack of sanctions for people who like to litter*

**Keywords:** *Policy Implementation, Plastic Waste*

## A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi berbagai kota di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah timbunan sampah dan keberagaman karakteristik sampah. Semua hal tersebut diiringi dengan sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum baik (Sari, dkk, 2018).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton dan hasil penelitian Jeena Jambeck 2015 dalam Istirokhatun dan Nugraha (2019), menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton (Purwaningrum, 2016) dalam Istirokhatun dan Nugraha (2019).

Pengelolaan sampah metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) ini bertujuan untuk mengurangi sampah dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat

terhadap sampah. Metode 3R sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi sulit implementasinya. Keberhasilan pengelolaan sampah metode 3R ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dengan mengubah perilakunya (Dwiyanto, 2011: 241) dalam Sari, dkk, (2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan (Nuraini, 2018).

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran,

kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Sampah dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan tepat, karena dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mencemari ekosistem tanah, air, dan udara (Wibowo, 2011).

Sampah plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal, salah satunya adalah untuk membawa barang hasil belanja. Di samping kegunaannya tersebut, plastik juga sering digunakan sebagai bungkus makanan ringan atau pun sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai hiasan. Plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika sudah tidak digunakan lagi. Selain bisa menyebabkan kerusakan pada tanah, sampah plastik juga berbahaya terhadap lingkungan air. Limbah plastik yang menumpuk akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sembarangan termasuk membuang di selokan atau pun di sungai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir serta dapat menyebabkan bertambahnya zat berbahaya yang dapat mengakibatkan hewan-hewan penghuni sungai mati.

Saat ini jumlah tenaga/personil kebersihan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Prabumulih sebanyak 242 orang. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih dalam upaya pengelolaan persampahan di Kota Prabumulih dapat diketahui jumlah armada pengangkutan adalah:

- a. Dump Truck : 15 unit ( 12 Unit yg Beroperasi 3 Unit Rusak )
- b. Arm Roll Truck : 4 Unit ( 1 Unit dalam kondisi tidak layak pakai )
- c. Motor Sampah : 2 unit
- d. Buldozer : 2 unit ( 1 Unit Rusak )
- e. Exavator : 2 unit

Kota Prabumulih mempunyai satu tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang berada di Kelurahan Prabu Jaya seluas 5,8 Ha, dan menggunakan sistem control landfill. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) berjumlah 19 unit yang berupa kontainer berlokasi tersebar di Enam Kecamatan di Kota Prabumulih, Volume timbulan sampah di Kota Prabumulih yang terangkut setiap harinya berkisar pada angka 216M<sup>3</sup>/hari.

Di sektor persampahan Pemerintah Kota Prabumulih akan terus melakukan kegiatan dapat meningkatkan kualitas kebersihan yang berdampak pada kenyamanan penduduk Kota Prabumulih. Dengan mengadakan penambahan Sarana dan Prasarana dan SDM. Beberapa upaya

yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kota Prabumulih yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Tempat Pemilahan Sampah Permanen Ramah Lingkungan di Enam Kecamatan
2. Penambahan Tong sampah kapasitas 80 liter
3. Penambahan armada motor sampah
4. Wheel Loader yang dioperasikan di TPA dan Kegiatan Pembersihan Gotong Royong
5. Penambahan armada mobil sampah kapasitas 4000 cc
6. Peningkatan Kualitas SDM Penyehatan Lingkungan Permukiman

Dalam penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Prabumulih Selatan, dalam pengelolaan sampah di wilayah ini masih mengalami banyak kendala yaitu pola hidup masyarakat yang kurang teratur hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat bukan ditempat yang semestinya, Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah hal ini diperlihatkan dengan masyarakat tidak melakukan pemilahan antara sampah plastik dan yang bukan plastik, Kurangnya sosialisasi dari mengenai pengelolaan sampah, sosialisasi yang dilakukan pemerintah seperti mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan

Hidup dalam upaya membuka wawasan masyarakat, karena sejauh ini program tersebut belum sesuai harapan, meskipun sudah ada program bank sampah yang bertujuan antara lain membiasakan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta memilah sampah dimulai dari rumah tangga nampaknya, penerapan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 yang belum berjalan sesuai harapan dan program mengenai pengelolaan sampah masih minim sejauh ini hanya ada bank sampah dan Pusat Daur Ulang (PDU). Maka atas dasar permasalahan tersebutlah peneliti ingin melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih”**

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses

melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Presiden atau Dekrit Presiden. Banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik, namun setidaknya kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga dari suatu kebijakan berfungsi untuk mewujudkan dua komponen yang lain. Cara ini biasa disebut Implementasi.

Nakamura dan Smallwood (Hessel, 2003: 165) mengemukakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan dalam *Webster Dictionary*, implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (Wahab, dalam Warella, dkk, 2006:1).

Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah

tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang /peraturan yang bersangkutan.

Pakar kebijakan publik. Grindle (dalam Warella, dkk, 2006: 12) mengemukakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan arah kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Jadi, kebijakan publik diterjemahkan dalam kegiatan program yang membantu tujuan akhir yang ditetapkan dalam kebijakan. Menurut Grindle studi implementasi kebijakan selalu melibatkan penelitian dan analisis tindakan berupa program yang kongkrit yang telah dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas. Penekanan implementasi adalah pada penciptaan suatu *policy delivery system* di mana sarana yang spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat sampai pada tujuan

akhir tertentu.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan *Administrative* yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan *alternative-alternatif* yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Menurut Edward III, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi (*output, outcomes*) yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Yang termasuk aktivitas

implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan, dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dari proses perencanaan sampai dengan penerapan ketentuan dari kebijakan yang berkenaan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

Dalam penelitian ini, teori yang menjadi acuan utama dalam pembentukan kerangka berpikir adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan alasan bahwa faktor - faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan lebih cenderung kepada faktor internal, sedangkan faktor eksternal pengaruhnya relatif kecil meskipun peneliti akan tetap berusaha mencari faktor-faktor eksternal tersebut. Dengan demikian meskipun teori yang digunakan penelitian ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

## **1. Komunikasi**

Konsep komunikasi dalam penelitian ini harus dapat diukur atau dimiliki suatu variasi nilai tertentu untuk memenuhi tuntutan sebagai variabel penelitian, oleh karena itu konsep ini dimaknai sebagai tingkat komunikasi. Dalam organisasi kelompok, komunikasi dipandang sebagai proses pentransferan makna

di antara para anggotanya. Komunikasi juga harus dipahami oleh segenap anggota organisasi secara sama. Oleh karena itu, komunikasi mencakup baik pentransferan maupun pemahaman makna (Robbins, 1996: 20).

Thoha (2002: 145) menjelaskan komunikasi adalah salah satu bentuk usaha atau langkah menyampaikan dan menerima kabar atau suatu informasi dari individu kepada individu lainnya. Bentuk komunikasi yang pas dan tepat tentu tidak akan bisa terealisasi jikalau dalam penyampainya berita tersebut disampaikan secara baik dan yang menerima kabar menerima kurang dalam pemahaman maka akan ada distorsi. Berhasil tidaknya komunikasi dalam Lembaga atau organisasi dapat dilihat dari:

- 1) Apakah tujuan dari pesan yang disampaikan itu tercapai atau tidak;
- 2) Apakah alat komunikasi atau bahan-bahan keterangan yang sudah dilambangkan kedalam simbol-simbol itu mengantar pesan atau tidak;
- 3) Apakah penerima pesan dapat memahami apa yang dipesankan atau tidak.

Banyak hal yang bisa menimbulkan hambatan diantaranya tingkatan hierarki dalam organisasi implementor kebijakan, penggunaan saluran komunikasi yang tidak langsung dan aspek internal pelaksana sendiri yang

mencoba mengabaikan apa yang sudah jelas untuk kemudian membuat persepsi yang berbeda dengan isi pesan. Perintah-perintah pelaksanaan kebijakan harus jelas dan konsisten, jika implementasi kebijakan ingin efektif.

“ Meneruskan perubahan - perubahan yang jelas tetapi bertentangan tidak akan memudahkan bagi pelaksana menjalankan tugasnya dalam memperlancar implementasi program Perubahan-perubahan implementasi yang tidak konsisten mungkin mendorong organisasi pelaksana untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, yang akan berdampak pada upaya pencapaian tujuan-tujuan kebijakan yang menjadi tidak efektif lagi “

## **2. Sumber daya**

Sumber daya manusia adalah faktor yang penting dalam suatu organisasi karena mereka merupakan faktor penggerak roda organisasi. Untuk itu diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksana suatu program atau kebijakan. Menurut Edward III (1980: 30) menyatakan bahwa "sumber daya biasa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya penting, meliputi staf dengan jumlah yang cukup dan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta



informasinya, otoritasnya dan fasilitas yang perlu untuk menerjemahkan proposal kedalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Thoha (1993: 154) kemampuan pegawai didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan. Sedangkan menurut Reesenzweig (Gibson, 1991: 123) dikatakan bahwa kemampuan seorang pegawai yang cocok dimiliki setiap organisasi modern adalah: a) Keterampilan teknis; b) Keterampilan kemanusiaan; c) Kemampuan konseptual. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dirumuskan bahwa kemampuan yang dimaksud adalah kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pelaksana kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan dalam penelitian ini adalah semua potensi berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada pemerintahan.

### **3. Struktur Birokrasi**

Suatu struktur birokrasi

menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Dalam merancang suatu struktur organisasi perlu diperhatikan enam unsur utama yaitu: 1) spesialisasi kerja, 2) determinetalisasi, 3) rantai komando, 4) rentang kendali, 5) sentralisasi dan desentralisasi, dan 6) formalisasi (Robins, 1996: 32).

Pemahaman tentang struktur organisasi dalam penelitian ini diterapkan pada organisasi publik atau pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah birokrasi, sehingga konsepnya berubah menjadi struktur birokrasi. Beberapa unsur pokok organisasi yang telah dikemukakan Robins sebelumnya juga ditemukan dalam birokrasi seperti yang dikemukakan oleh Edward (1980: 143), ada dua bentuk karakteristik urgen dalam variabel struktur birokrasi, yaitu a) *Standard Operating Prosedures (SOP)* dan b) *fragmentasi*, dapat dikatakan bahwa SOP berkenaan dengan unsur formalisasi sedangkan *fragmentasi* berkaitan dengan spesialisasi dan departementalisasi.

SOP merupakan wujud dari reaksi dari keterbatasan waktu serta sumber daya dan kemauan untuk kerbersamaa dalam pengoperasian didalam organisasi pelaksanaan yang begitu kompleks serta tersebar. Pengimplementasian kebijakan publik bergantung kepada kejelasan dari standar prosedur tindakannya yang biasanya berbentuk pedoman

tata cara pelaksanaan dan pedoman teknis atau wujud yang lain, hal ini disebabkan oleh dalam SOP ada urutan tahapan-tahapan dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan dari awal sampai akhir oleh sebab itu kegiatan pengimplementasian bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, khususnya masalah pemantapan sumber daya yang terbatas.

Adapun *fragmentasi* adalah menyebarluaskan bentuk akuntabilitas dari wilayah kebijakan. Akuntabilitas dari pusat cuma terbatas pada pembinaan dan penyebaran bantuan untuk daerah. Semakin banyak aktor serta lembaga yang dilibatkan dalam suatu kebijakan, dan semakin tinggi tingkat ketergantungannya ketika pengambilan keputusan, maka semakin rendah adanya kemungkinan pengimplementasian kebijakan akan terlaksana dengan efektif. Sebagai suatu bagian dari *fragmentasi* organisasi, koordinasi diantara implementor harus ada sebagai konsekuensi logis dari pemecaran wilayah akuntabilitas kebijakan diantara beberapa unit implementor.

#### **4. Disposisi**

Makna disposisi khusus dalam implementasi kebijakan dimaknai menjadu perilaku, wujud sikap, keinginan kecenderungan sikap, kesepakatan bersama implementor dalam menjalankan kebijakan yang dibuat. Bentuk implementasi kebijakan bisa dibidang

efektif, jika implementor bukan cuma tahu yang dilakukan atau dimiliki kecermatan dalam melaksanakan peraturan tersebut, akan tetapi implementor juga semestinya mempunyai keinginan dalam menjalankan peraturan itu.

Edward III dalam Winarno menjelaskan (2005:142-143) bahwa " Disposisi adalah salah-satu hal yang memiliki timbal balik yang urgen dalam pengimplementasian kebijakan agar lebih efektif". Bilamanapun Implementor memiliki keinginan atau sikap baik bisa dikatakan mendukung dalam peraturan atau kebijakan, maka ada kemungkinan bahwa implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan semestunya apa yang diputuskan sejak awal. Namun bisa terjadi yang sebaliknya jikalau implementor menunjukkan kecenderungan tidak suka terhadap implementasi peraturan karena adanya konflik dan tujuan pribadi, bisa dipastikan implementasi peraturan akan mengalami masalah yang cukup serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

## Sampah

Pengertian Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak di senangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah biasanya berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya (Sejati, 2009) .

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara untuk mengendalikan kembali semua masalah. Sesuai dengan tujuan penelitian, secara deskriptif kualitatif mengidentifikasi jenis penelitian yang digunakan penulis. Penelitian kualitatif pada dasarnya menjaga kemampuan orang lain di lingkungan untuk memahami mereka, dan mencoba memahami bahasa dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Ini juga dapat

menggambarkan keadaan keseluruhan situasi, termasuk keadaan lingkungan saat ini, personel, dan alur kerja. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan memuat referensi data untuk memberikan gambaran tentang penyajian laporan. Data berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, file pribadi dan dokumen lainnya. Maka peneliti akan mencoba menjelaskan fakta yang ditemukan di bidang ini.

Dalam penelitian ini, tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Menurut penelitian Sugiyono (2012: 1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda-benda alam, di mana peneliti adalah alat utamanya, teknik datanya adalah triangulasi, dan analisis datanya bersifat induktif. Penelitian ini cenderung mengutamakan proses, oleh karena itu penelitian ini menganalisis bagaimana gambaran aktual tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

### **D. HASIL PENELITIAN**

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan teori Edward III dengan menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan menggunakan metode penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka di dapatlah beberapa point penting sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Hasil peneliitan bahwa peneliti melihat di beberapa wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan banyak sampah yang berserakan di jalan maupun di aliran saluran pembuangan air, kemudian jika diperhatikan kotak sampah dari pemerintah juga masih kurang, sehingga lahan-lahan kosong dijadikan tempat pembuangan sampah, hal ini menandakan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah plastic masih kurang, kemudian alur komunikasi dan koordinasi antar instansi baik Kecamatan maupun Dinas Lingkungan Hidup masih kurang.

### 2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian bahwa problem utama daripada sumber daya adalah kurangnya tenaga atau

petugas dari dinas lingkungan hidup yang bertugas dalam bidang kebersihan, kemudian untuk sarana dan prasarana pemerintah tidak terlalu banyak menyediakan tempat sampah sehingga masyarakat menyalahgunakan lahan kosong untuk membuang sampah sembarangan.

### 3. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian bahwa dari pihak pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang ditujukan dalam penanggulangan sampah plastik, akan tetapi memang masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki baik dari sisi penambahan sarana dan prasarana dari DLH dan juga sumber daya petugas kebersihannya, dan tentu ini juga harus di dukung oleh disiplin masyarakat.

### 4. Disposisi

Dari hasil penelitian bahwa hal yang menjadi pokok utama adalah kebiasaan masyarakat dan juga instansi terkait yang kurang mendukung dalam pengadaan sarana prasarana, sehingga dalam upaya pengimplementasian Perda penanggulangan sampah plastik tidak berjalan dengan maksimal.

### 5. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian bahwa kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Dalam Rangka Penanggulangan Sampah Plastik merupakan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan sampah plastik di Kecamatan

Prabumulih Selatan, karena dengan adanya kebijakan tersebut instansi pemerintah terkait bisa membuat program dan aturan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi sampah plastik.

#### 6. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak memperhatikan dengan baik soal sampah plastik, dimana kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan masih menjadi sikap turun temurun dan sulit untuk dirubah, dan meskipun sebanyak apapun petugas dan sarana yang disediakan pemerintah jika masyarakatnya masih seperti ini tentu sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### E. TEMUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa temuan penelitian yaitu bahwa persoalan sampah plastik yang tidak terkendali di Kecamatan Prabumulih Selatan, meskipun sudah ada perda yang mendukung yaitu:

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah dalam menanggulangi sampah plastic yaitu alat angkut sampah.
2. Kurangnya sumber daya manusia atau petugas kebersihan yang betugas untuk mengangkut sampah.
3. Kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tentu hal ini

diperlukan edukasi dari usia dini.

4. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah untuk masyarakat yang melanggar aturan dan kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan sampah.

Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sufi (2022)/ berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Dumai Timur kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS

di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. (2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

Dalam keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan sampah plastik di wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan. Perlu dilakukan perbaikan dalam komunikasi, penambahan sumber daya, perbaikan struktur birokrasi, dan perubahan disposisi baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik.

Dalam keseluruhan, analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik di wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan membutuhkan perbaikan dalam beberapa aspek. Komunikasi yang efektif, penambahan sumber daya, perbaikan struktur birokrasi, dan perubahan disposisi baik dari pemerintah maupun masyarakat menjadi langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas

kebijakan pengelolaan sampah plastik. Dengan melakukan perbaikan dalam aspek-aspek ini, diharapkan pengelolaan sampah plastik dapat menjadi lebih baik dan berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut.

## **F. KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Sampah Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dibuatnya regulasi pengurangan penggunaan kantong plastik ini sudah tepat yaitu untuk kepentingan publik karena tujuannya adalah demi kebaikan lingkungan terutama menjaga lingkungan dari dampak buruk sampah plastik. Regulasi ini juga diharapkan mampu membuat masyarakat lebih partisipatif sebagaimana tujuan dibentuknya regulasi ini yaitu untuk membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup. Namun implementasi dari kebijakan ini didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pola hidup masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan serta minimnya sanksi bagi

masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah plastik masih rendah, kurangnya sosialisasi,

himbauan mengenai kebijakan kurang ditaai serta program pengelolaan sampah plastik masih minim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih. 2008. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. Rumah Tangga
- Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly Press
- Gibson, Ivanovich Donnely. 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta:Erlangga.
- H.B. Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas. Sebelas Maret Press
- Moleong, Lexy J, 2007 . *Metode Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer
- Strauss, A. dan Corbin, J. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Negara*. Jakarta:Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang:Bayumedia
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press

## KEBIJAKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga